



Analysis of Performance Measurement Using the Value For Money Method at Departments in the City of Bogor

Serli Margareta^{1*}, Ade Budi Setiawan², Warizal³, Yuppy Triwidatin⁴
Universitas Djuanda Bogor

Corresponding Author: Yuppy Triwidatin yuppy_triwidatin@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kinerja, VFM, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas

Received : 17 June

Revised : 23 July

Accepted: 25 August

©2023 Margareta, Setiawan, Warizal, Triwidatin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Performance in government agencies is very important to know how well programs and activities are implemented each year. This research was conducted to measure the performance of government agencies using the Value For Money method at the Bogor City Transportation Service. This research aims to determine the performance of the Bogor City Transportation Department for the 2019-2021 period in terms of three elements, namely; economy, efficiency and effectiveness. The research design with the data used is LAKIP and LRA for the 2019-2021 period with data analysis tools using the VFM method. The research results show that the performance of the Bogor City Transportation Department for the 2019-2021 period of performance measurement is categorized as very good. Based on the VFM method, in terms of the economic level in 2019-2021, it is categorized as very economical, in terms of the efficiency level in 2019-2021, it is categorized as inefficient, in terms of the level of effectiveness of the performance measurement results in 2019-2021, it is categorized as very effective.

Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Dinas di Kota Bogor

Serli Margareta^{1*}, Ade Budi Setiawan², Warizal³, Yuppy Triwidatin⁴

Universitas Djuanda Bogor

Corresponding Author: Yuppy Triwidatin yuppy.triwidatin@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kinerja, VFM, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas

Received : 17 Juni

Revised : 23 Juli

Accepted: 25 Agustus

©2023 Margareta, Setiawan, Warizal, Triwidatin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Suatu kinerja dalam instansi pemerintah sangatlah penting untuk mengetahui seberapa baik program maupun kegiatan yang terlaksana setiap tahunnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Dinas Perhubungan Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor periode tahun 2019-2021 ditinjau dari tiga elemen yaitu; ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Desain penelitian dengan data yang digunakan yaitu LAKIP dan LRA periode tahun 2019-2021 dengan alat analisis data menggunakan metode VFM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor periode tahun 2019-2021 pengukuran kinerja dikategorikan sangat baik. Berdasarkan metode VFM ditinjau dari tingkat ekonomi tahun 2019-2021 dikategorikan sangat ekonomis, ditinjau dari tingkat efisiensi tahun 2019-2021 dikategorikan tidak efisien, ditinjau dari tingkat efektivitas hasil pengukuran kinerja tahun 2019-2021 dikategorikan sangat efektif.

PENDAHULUAN

Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. (Presiden Republik Indonesia, 1999). Dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja ini dilakukan untuk melihat apakah tujuan pemerintah dalam satu periode sudah terlaksana dengan baik. Untuk mengetahui kinerja pemerintah telah terlaksana dengan baik, maka dilakukan penilaian kinerja pada instansi pemerintah. Penilaian kinerja tersebut digunakan untuk mengukur suatu program atau kegiatan dari organisasi dalam mencapai tujuannya dan dapat dijadikan untuk bahan perbaikan di masa yang akan datang. Untuk menjalankan suatu kinerja yang baik terutama di instansi pemerintah, tugas utamanya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena kinerja instansi pemerintah saat ini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggung jawaban para penyelenggara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintah yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif dan akuntabel.

Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Tujuannya untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja keuangan ini digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Ukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan anggaran berbasis kinerja dapat dilakukan dengan konsep *value for money*, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Penelitian terdahulu Pratama dkk, (2022), meneliti mengenai analisis pengukuran kinerja berbasis konsep *value for money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. Peneliti menyimpulkan bahwa perhitungan tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah tingkat ekonomi sebesar 89,54%, 89,78% dan 89,15%, dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sudah ekonomis. Meskipun dari tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Untuk tingkat efisiensi sebesar 98,53%, 102,82% dan 100,03%, dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2018 dan 2019 tidak efisien, dikarenakan realisasi pendapatan lebih kecil

dibandingkan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dan tingkat efektivitas sebesar 99,61%, 96,55% dan 95,37%, dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan kurang efektif, dikarenakan tidak tercapainya realisasi pendapatan oleh beberapa pos yang tidak terpenuhi.

Dinas Perhubungan Kota Bogor merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, juga satuan kerja yang memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan kinerja. Pada laporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor, pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja tahun 2019-2021, pengukuran kinerja ini hanya fokus pada *volume, output* atau pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Berikut adalah data anggaran penerimaan dan belanja serta realisasinya periode tahun 2019-2021 pada Laporan Kinerja (LAKIN).

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja

Pendapatan			
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2019	5.846.971.000	5.564.619.100	95,17%
2020	4.108.848.000	4.345.980.500	105,77%
2021	3.782.296.000	3.519.800.700	93,06%
Belanja			
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2019	63.014.969.848	57.290.739.800	90,92%
2020	51.113.502.945	45.556.111.907	89,13%
2021	111.241.874.749	98.389.844.032	88,45%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bogor, 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bogor kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, mulai dari tahun 2019-2021 anggaran yang ditetapkan dan realisasi pendapatan yang diperoleh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Disisi lain anggaran dan realisasi belanjanya dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan.

Untuk kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor pada tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp5.846.971.000 dan tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp4.108.848.000 tidak mampu mengumpulkan pendapatan sesuai anggaran. Namun pada tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp3.782.296.000 mampu melampaui anggaran pendapatan yang ditetapkan. Sedangkan dilihat dari aspek belanja Dinas Perhubungan Kota Bogor pada tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan anggaran masing-masing sebesar Rp63.014.969.848, Rp51.113.502.945 dan Rp111.241.874.749 mampu melakukan kegiatan belanja tanpa melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah Teori Tata Laksana atau *Stewardship Theory*. Teori Tata Laksana atau *Stewardship Theory* yaitu menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-

tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan teori lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan teori *stewardship* beranggapan bahwa adanya hubungan yang kuat kepuasan dengan kesuksesan organisasi. Sudaryo (2017).

Akuntansi sektor publik merupakan aktifitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik dapat dinyatakan sebagai aktifitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Siregar (2015).

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi dan atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Moehariono (2014).

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas. *Value for Money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Mardiasmo (2018: 404).

TINJAUAN PUSTAKA

Metode Value for Money (VFM) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi atau proyek dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan sumber daya yang dikeluarkan. Metode ini sering digunakan dalam sektor publik untuk menilai apakah sumber daya yang diinvestasikan menghasilkan manfaat yang sebanding atau lebih besar. Dalam konteks Dinas di Kota Bogor, penggunaan VFM dapat membantu dalam mengukur sejauh mana dana publik yang digunakan mencapai hasil yang optimal. Tujuan utama dari analisis VFM adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang diinvestasikan dalam pelaksanaan program atau layanan publik mencapai hasil yang maksimal. Ini berarti mengukur efektivitas dan efisiensi pengeluaran publik.

Komponen Utama VFM:

- Efektivitas: Mengukur sejauh mana program atau layanan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Dinas di Kota Bogor, ini dapat berarti menilai sejauh mana program-program mereka mencapai hasil yang diharapkan, seperti peningkatan kualitas hidup warga kota atau peningkatan layanan publik.
- Efisiensi: Mengukur sejauh mana sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program atau layanan sesuai dengan biaya yang

dikeluarkan. Dalam hal ini, Dinas di Kota Bogor perlu memastikan bahwa pengeluaran mereka seefisien mungkin tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Langkah-langkah Analisis VFM:

- Identifikasi Tujuan: Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan dan hasil yang diharapkan dari program atau layanan yang akan dievaluasi. Dalam konteks Dinas di Kota Bogor, ini bisa mencakup tujuan seperti peningkatan infrastruktur kota, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.
- Pengumpulan Data: Data yang relevan harus dikumpulkan, termasuk data anggaran, data kinerja, dan data lain yang diperlukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi.
- Analisis VFM: Setelah data terkumpul, analisis VFM dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan sumber daya yang dikeluarkan. Hasil dari analisis ini akan menggambarkan sejauh mana program atau layanan mencapai VFM.
- Rekomendasi dan Perbaikan: Hasil analisis VFM dapat digunakan untuk membuat rekomendasi perbaikan. Dinas di Kota Bogor dapat menggunakan temuan ini untuk mengoptimalkan alokasi anggaran, meningkatkan proses, atau mengubah strategi pelaksanaan program atau layanan.

Keuntungan dari Analisis VFM:

- Meningkatkan Akuntabilitas: Analisis VFM membantu meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, karena hasilnya dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat.
- Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Informasi yang diperoleh dari analisis VFM membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal alokasi sumber daya.
- Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas: Dengan mengevaluasi kinerja, Dinas di Kota Bogor dapat mengidentifikasi cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program atau layanan mereka.

METODE PENELITIAN

Desain penelitiannya adalah metode deskriptif, tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan tertentu dari suatu subjek yang diteliti dan untuk mendapatkan informasi mengenai hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *value for money* pada Dinas Perhubungan Kota Bogor. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data anggaran perusahaan berupa LRA dan LAKIP tahun anggaran 2019-2021.

Metode Analisis Data

Penelitian ini akan mengukur kinerja menggunakan metode *value for money* dengan tiga elemen yang diteliti yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas di Dinas Perhubungan Kota Bogor periode 2019-2021.

1. Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara nilai uang dan masukan atau praktik pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terendah. Halim dan Iqbal (2019).

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
75% - keatas	Sangat Ekonomis
60 - 75%	Ekonomis
45 - 60%	Cukup Ekonomis
30 - 45%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 30%	Tidak Ekonomis

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 47, (1999)

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Mahmudi (2019).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
75% - keatas	Sangat Efisien
60 - 75%	Efisien
45 - 60%	Cukup Efisien
30 - 45%	Kurang Efisien
Kurang dari 30%	Tidak Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 47, (1999)

3. Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Mahmudi (2019).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
75% - keatas	Sangat Efektif
60 - 75%	Efektif
45 - 60%	Cukup Efektif
30 - 45%	Kurang Efektif
Kurang dari 30%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 47, (199)

HASIL PENELITIAN

1. Kondisi Kinerja yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor pada Periode 2019-2021

Berdasarkan pasal Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Perhubungan Kota Bogor dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Capaian Kinerja

No	Predikat/Kategori	Capaian (%)
1	Sangat Baik	>90
2	Baik	75.00 - 89.99
3	Cukup	65.00 - 74.99
4	Kurang	50.00 - 64.99
5	Sangat Kurang	0 - 49.99

Sumber: LKIP Dinas Perhubungan Kota Bogor

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai tugas fungsi yang diemban Dinas Perhubungan Kota Bogor. Tahun 2019 hasil pengukuran terhadap 5 sasaran kegiatan dengan 9 indikator kinerja terlihat bahwa capaian kerjanya tidak tercapai dari target 100%, sedangkan predikat capaian kinerja untuk realisasi

capaian kinerja masuk dalam kategori predikat **cukup** (72,36%). Tahun 2020 hasil pengukuran terhadap 5 sasaran kegiatan dengan 8 indikator kinerja terlihat bahwa capaian kerjanya tidak tercapai dari target 100% , sedangkan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja masuk dalam kategori predikat **sangat baik** (94,79%). Tahun 2021 hasil pengukuran terhadap 3 sasaran kegiatan dengan 4 indikator kinerja terlihat bahwa capaian kerjanya tidak tercapai dari target 100% , sedangkan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja masuk dalam kategori predikat **sangat baik** (94,40%).

a. Hasil Pengukuran Kinerja Metode Value For Money Hasil Perhitungan Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi ini memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*input*) sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang lebih rendah. Pengertian dari ekonomi adalah perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Untuk tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya. Maka untuk mendeskripsikan pengukuran kinerja dari elemen ekonomi disajikan deskripsi data dari yang terdapat di Dinas Perhubungan Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 5. Rasio Ekonomi Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2019-2021

No	Uraian	Anggaran Pengeluaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)	Rasio Ekonomi (%)
2019					
1	Belanja Pegawai	40.356.956.848	37.475.319.232	2.881.637.616	92,85
2	Belanja Barang	14.755.463.000	12.602.014.355	2.153.448.645	85,40
3	Belanja Modal	7.902.550.000	7.213.406.213	689.143.787	91,27
	Jumlah	63.014.969.848	57.290.739.800	5.724.230.048	90,92
2020					
1	Belanja Pegawai	31.104.172.025	29.479.700.330	1.624.471.695	94,77
2	Belanja Barang	17.402.434.920	15.524.393.593	1.878.041.327	89,20
3	Belanja Modal	2.606.896.000	2.552.017.984	54.878.016	97,89
	Jumlah	51.113.502.945	45.556.111.907	5.557.391.038	89,13
2021					
1	Belanja Pegawai	32.093.412.125	31.140.738.843	952.673.282	97,03
2	Belanja Barang	70.101.292.401	58.934.608.248	11.166.684.153	84,07
3	Belanja Modal	9.047.170.223	8.314.496.641	732.673.582	91,90
	Jumlah	111.241.874.749	98.389.844.032	12.852.030.717	88,45

Sumber: Data diolah, 2023

b. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi ini memiliki pengertian bahwa pencapaian *output* yang maksimal dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang rendah untuk

mencapai *output* tertentu. Dalam mendeksripsikan pengukuran kinerja dari elemen efisiensi, maka disajikan deskripsi data dari yang terdapat di Dinas Perhubungan Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 6. Rasio Efisiensi Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Pengeluaran (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Keterangan
2019	57.290.739.800	5.564.619.100	10,29	Tidak Efisien
2020	45.556.111.907	4.345.980.500	10,48	Tidak Efisien
2021	98.389.844.032	3.519.800.700	27,95	Tidak Efisien

Sumber: Data diolah, 2023

c. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas ini memiliki pengertian bahwa hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan, efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut ini adalah tabel mengenai pengukuran efektivitas Dinas Perhubungan Kota Bogor dari rasio efektivitas sebagai berikut:

Tabel 7. Rasio Efektivitas Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2019-2021

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
2019	5.846.971.000	5.564.619.100	95,17	Sangat Efektif
2020	4.108.848.000	4.345.980.500	105,78	Sangat Efektif
2021	3.782.296.000	3.519.800.700	93,05	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2023

PEMBAHASAN

1. Pembahasan Kondisi Kinerja yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor pada periode tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel yang sudah dijelaskan bahwa 3 (tiga) tahun terakhir pengukuran indikator kinerja sasaran dapat digambarkan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Bogor. Tahun 2019 nilai capaian rata-rata sebesar nilai 72,36% atau tidak tercapai dari 100% dengan predikat cukup, dikarenakan masih ada kegiatan yang tidak terlaksanakan dan tidak terlaksana 100% yang ada disalah satu sasaran strategis pencapaian indikator kinerja utama seperti pada peningkatan pelayanan angkutan terdapat tiga kegiatan yang tidak terlaksana yaitu pertama, rekruturisasi/ *rerouting* angkutan Kota dan AKDP hambatannya adalah penetapan jaringan trayek angkutan kota (keputusan Wali Kota Bogor Nomor 551.2.45-81 Tahun 2018) dari 23 trayek menjadi 30 trayek *feeder* dari 7 TPK tidak berjalan efektif, selain terjadi gesekan operasional di lapangan juga kendala infrastruktur sehingga berdampak proram *rerouting*, reduksi dengan konversi (3:1 dan 3:2) tidak berjalan. Kedua, operasional pelayanan angkutan wisata hambatannya adalah operasional pelayanan angkutan wisata direncanakan sebanyak 2 unit, realisasi 1 unit (CSR BJB), sedangkan 1 unit

tambahan direncanakan hibah dari provinsi Jawa Barat, namun realisasi pemberian hibah di akhir tahun 2019. Dan yang ketiga operasional UPTD terminal dan angkutan hambatannya adalah sejak diterbitkan Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PERDA No. 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan modal daerah kepada PD. Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, fasilitas utama terminal merdeka merupakan bagian dari penyertaan modal, sehingga UPTD terminal dan angkutan hanya menggunakan fasilitas penunjangnya saja sebagai kantor UPTD terminal dan angkutan, sehingga perlu ada kejelasan status dan fungsi terminal sebagai sarana perhubungan yang terintegrasi dengan stasiun KA Bogor.

Tahun 2020 nilai capaian rata-rata sebesar nilai 94,79% atau tidak tercapai dari target 100%, namun predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja masuk dalam kategori predikat sangat baik. Sedangkan untuk pagu anggaran lebih besar daripada jumlah realisasi, untuk itu pencapaian sasarnya dikatakan berjalan dengan baik. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja DISHUB Kota Bogor sebesar 90,15% yang termasuk kategori predikat sangat baik. Sehingga dari kelima pencapaian indikator sasaran Dinas Perhubungan Kota Bogor tahun 2020 sudah berjalan dengan baik, meskipun ada kendala yang ada pada sasaran indikator seperti terdapat beberapa kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja sasaran yang terkena *refocusing* akibat pandemic COVID-19, sehingga terdapat beberapa kebutuhan pengadaan maupun pemeliharaan perlengkapan jalan yang belum dapat dipenuhi. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik serta tercapainya suatu tujuan dalam waktu yang seefisien mungkin. Mardiasmo (2017).

Tahun 2021 nilai capaian rata-rata sebesar nilai 94,40% atau tidak tercapai dari target 100%, namun predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja masuk dalam kategori predikat sangat baik. Sedangkan untuk pagu anggaran lebih besar daripada jumlah realisasi, untuk itu pencapaian sasarnya dikatakan berjalan dengan baik. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor sebesar 88,45% yang termasuk kategori predikat baik. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahkan tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dilihat apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Pratiwi (2020). Sehingga dari ketiga pencapaian indikator sasaran DISHUB Kota Bogor tahun 2020 sudah berjalan dengan baik, meskipun ada kendala yang ada pada sasaran indikator seperti adanya

sebagaimana masyarakat yang masih merasa tidak puas terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor yang masih perlu ditingkatkan.

2. Pembahasan Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor Menggunakan Metode *Value For Money*

a. Pembahasan Hasil Perhitungan Ekonomi TA 2019-2021

Dari tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa perkembangan rasio ekonomis Dinas Perhubungan Kota Bogor sangat konsisten berada pada kategori ekonomis, hal ini dapat dilihat dari total anggaran yang disediakan setiap tahunnya, tidak habis terpakai dalam memenuhi seluruh program kerja setiap tahunnya dengan nilai rata-rata *output* yang dihasilkan hampir mencapai maksimal yaitu pada tahun 2019 sebesar 90,92%, pada tahun 2020 sebesar 89,13% dan pada tahun 2021 sebesar 88,45%. Tahun 2019 total anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp63.014.969.848 dan pada proses pelaksanaan program kerjanya hanya sebesar Rp57.290.739.800, dengan penghematan anggaran sebesar Rp5.724.230.048. Pada tahun 2020 merupakan tahun dimana terjadi penghematan anggaran terbesar dari total anggaran Rp51.113.502.945 dan pada pelaksanaan kegiatan anggaran yang dipakai hanya sebesar Rp 45.556.111.907, dengan berarti telah terjadinya penghematan anggaran sebesar Rp5.557.391.038. Pada tahun 2021 total anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp111.241.874.749 dan pada proses pelaksanaan program kerjanya hanya sebesar Rp98.389.844.032, dengan penghematan anggaran sebesar Rp12.852.030.717.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa yang berdasarkan kriteria tingkat ekonomis, karena penghasilan persentase dibawah 100% maka kinerja instansi tersebut dinyatakan ekonomis. *Rahmawati* (2019). Walaupun terjadi penghematan anggaran lebih besar pada tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa rasio ini bernilai sangat ekonomis, sehingga untuk ini indikator rasio ekonomis kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor sudah mencapai kinerja yang baik, karena dari penghematan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 telah berhasil mengelola penggunaan anggaran belanja dengan baik.

b. Pembahasan Hasil Perhitungan Efisiensi TA 2019-2021

Berdasarkan hasil analisis data pengukuran rasio efisiensi pada program kerja periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, diketahui periode tahun 2019 dapat dikatakan tidak efisien, karena Dinas Perhubungan Kota Bogor tidak dapat meminimalisir sumber daya yang dimiliki dalam hal ini anggaran yang digunakan sebesar 10,29% dari total anggaran yang disediakan dengan keluaran *output* yang tidak mampu mencapai 100% sehingga menghasilkan nilai rata-rata tidak efisiensi. Terdapat 4 (empat) kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi kurang dari 100% maka kegiatan tersebut tidak efisien, hal ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang dilakukan kurang dari persentase keuangan yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. *Arinda* (2021).

Selanjutnya dari hasil penelitian terhadap rasio efisiensi pada Dinas Perhubungan Kota Bogor ditunjukkan pada tabel 6 hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio efisiensi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,9%, dimana Dinas Perhubungan Kota Bogor ini tetap tidak berhasil meningkatkan pendapatan melebihi realisasi belanjanya, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 10,48% hal ini menunjukkan bahwa penelitian DISHUB Kota Bogor dilihat dari segi efisiensi termasuk kategori tidak efisiensi, karena nilainya kurang dari 30%.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa rasio efisiensi pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 27,95% yang berarti Dinas Perhubungan Kota Bogor tetap tidak berhasil meningkatkan pendapatan melebihi realisasi belanjanya, hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari segi efisiensi termasuk kategori tidak efisiensi, karena tidak mampu mencapai nilainya diatas 75% bahkan tidak lebih dari 100%. Dapat diartikan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bogor termasuk kategori tidak efisiensi, karena nilainya kurang dari 30%.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tidak efisien yaitu sumber daya manusia yang belum maksimal untuk mendukung kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bogor, koordinasi internal dengan peneliti dan pengelola anggaran belum berjalan secara optimal. Adanya penurunan setiap kegiatan pelayanannya, maka kinerja instansi tersebut dinyatakan tidak efisien. Larasati (2022). Untuk pengeluaran di Dinas Perhubungan Kota Bogor ini realisasi pengeluaran lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan, dikarenakan Dinas Perhubungan Kota Bogor merupakan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan tersebut lebih cenderung memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan yang belum optimal sehingga menyebabkan anggaran beanja untuk kegiatan tidak produktif atau tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan. Ferina (2017). Dilihat dari realisasi pengeluaran Dinas Perhubungan Kota Bogor tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terjadi penurunan yaitu pada tahun 2020 disebabkan karena masih ada beberapa kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja sasaran yang terkena *refocussing* akibat pandemi COVID-19, belum efektifnya pelaksanaan operasional pelayanan koridot/ trayek angkutan perkotaan berdasarkan SK jaringan trayek tahun 2018, terbatasnya kemampuan permodalan dan manajemen Badan Usaha Angkutan Umum, belum adanya PERDA yang mengatur sanksi denda akibat penggembokkan dan penderekan, kondisi sarana dan prasarana (fasilitas utama dan penunjang) terminal sangat tidak layak, ketidakpastian lahan Terminal Merdeka yang masuk dalam PMD pada Perumda Pasar Pakuan Jaya dan lokasi penyimpangan Bus Wisata "Uncal" dan Bus Sekolah tidak memadai. Sehingga Dinas Perhubungan Kota Bogor pelayanannya menjadi terbatas dan menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020.

c. Pembahasan Hasil Perhitungan Efektivitas TA 2019-2021

Dari tabel 7 hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Dinas Perhubungan Kota Bogor pada tahun 2019 adalah sebesar 95,17%, kemudian pada tahun 2020 tingkat efektivitas naik menjadi 105,78%, pada tingkat efektivitas ini dikatakan berjalan dengan baik karena mengalami kenaikan sebesar 10,61% dan untuk tahun 2021 tingkat efektivitas turun menjadi 93,05%. Tingkat efektivitas ini dikatakan kurang baik karena mengalami penurunan sebesar 12,73%.

Dapat diartikan bahwa tahun 2019 rasionya sebesar 95,17% termasuk kategori sangat efektif, rasio efektivitas dapat dikatakan efektif jika hasil perhitungannya menunjukkan nilai lebih dari 75%. Mahmudi (2019). Tahun 2020 rasionya mengalami kenaikan sebesar 105,78% yang berarti termasuk kategori sangat efektif, karena mampu mencapai nilai lebih dari 75%, akan tetapi tahun 2021 walaupun terjadi penurunan menjadi 93,05% masih termasuk kategori sangat efektif karena persentase lebih dari 75%, adanya penurunan tersebut bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kota dapat dikatakan baik karena mampu mencapai targetnya.

Rasio efektivitas diatas 90% artinya, realisasi anggaran belanja langsung hampir mendekati target belanja langsung yang dianggarkan. Capaian kinerja terhadap sasaran kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bogor tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Fahlevi dan Reza (2015) menyatakan akan mempengaruhi efektivitas anggaran belanja, karena proses pembahasan yang lama akan menghambat berjalannya program yang akan dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor telah menunjukkan kinerja yang memuaskan. Hasil pengukuran terhadap pengukuran kinerja pada tahun 2019 sampai tahun 2021 bahwa seluruh capaian kinerja yang mencakup sasaran kegiatan dan indikator kinerja termasuk dalam kategori keberhasilan atau sama dengan 100% (sangat berhasil).
2. Dari data yang diperoleh hasil analisis data dengan menggunakan metode *value for money* dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bogor pada tahun 2019 sampai tahun 2021 dari segi ekonomi menunjukkan kinerja yang sangat ekonomis karena rasio lebih dari 75%. Tahun 2019 rasio ekonomis mencapai 90,92%, tahun 2020 sebesar 89,13% dan tahun 2021 sebesar 88,45%. Sehingga untuk indikator rasio ekonomis Dinas Perhubungan Kota Bogor sudah mencapai kinerja yang baik. Dari segi efisiensi menunjukkan kinerja yang tidak efisien. Hal ini dapat dilihat dari

rasio efisiensi tahun 2019 adalah 10,29%, tahun 2020 tingkat efisiensi 10,48% dan tahun 2021 tingkat efisiensi menjadi 27,95%. Hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Bogor tidak berhasil meningkatkan pendapatan melebihi realisasi belanjanya. Dari segi efektivitas termasuk kategori sangat efektif, tahun 2019 rasio efektivitas mencapai 95,17%, tahun 2020 rasio efektivitas mencapai 105,78% dan tahun 2021 rasio efektivitas mencapai 93,05%. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor melalui analisis kinerja *value for money* termasuk sangat efektif karena rasionya lebih dari 75%.

REKOMENDASI

1. Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor pada tahun 2019 sampai tahun 2021 telah melaksanakan kegiatannya dengan ekonomis, efisien dan efektif. Hal tersebut diharapkan untuk kedepannya mampu mempertahankan atau dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun berikutnya, dan Dinas Perhubungan Kota Bogor dapat menghasilkan *output* (program kerja) yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.
2. Untuk tahun selanjutnya semoga Dinas Perhubungan Kota Bogor dapat meningkatkan pendapatan untuk mengimbangi realisasi belanjanya, agar lebih ekonomis, efisien dan efektif.

REFERENSI

- Ade Budi Setiawan, Ayi Zamaludin, Deuis Siti Annurul. 2020. *Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Value For Money Pada Satuan Kerja Balai Penelitian Tanaman Hias Kab. Cianjur*, Jurnal AKUNIDA, Vol. 6. No. 2. Hal: 54-68.
- Fahlevi dan Reza. 2015, *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung Studi Pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh*. JIP. Vol. 1. Hal: 37-44.
- Felia Putri Arinda. 2021. *Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau*, Hal 1-75.
- Ferina. 2017. *Penilaian Kinerja Dengan Menerapkan Indikator Value For Money Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 11. No. 21. Hal: 33-50.
- Halim Abdul, Iqbal Muhammad. 2019. *Pengelolaan keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Larasati Raja, S. S. 2022. *Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value For Money*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 1. Hal: 78-85.

- Mahmudi. 2019. *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit STIM YPKN.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moeheriono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pratama, V. Y., Syamsuddin, dan Farah Difa. 2022. *Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1. No. 2. Hal:149-155.
- Pratiwi Dian. 2020. *Pengukuran Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Metode Value For Money (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau Tahun 2019)*, Hal 1-84.
- Rahmawati, I. S. 2019. *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money*, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 8. No. 11. Hal: 1-16.
- Siregar. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada media Group.
- Siti Hasanah, Mas Nur Mukmin, Farizka Susandra. 2023. *Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT Wijaya Karya Industri Keuangan Perusahaan Pada PT Wijaya Karya Industri Energi Periode Tahun 2017-2021*, *Jurnal AKUNIDA*, Vol. 2. No. 2. Hal: 407-420.